

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib, 2014, *“Menjalin Pemikiran Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan),* Citra Aditya Bakti, Bandung.\
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indoneisa,* UII Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum,* Ghaila Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia,* Djambatan, Jakarta.
- _____, 2000, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,* Djambatan, Jakarta.
- HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien,* Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata,* Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta.
- Moechthar, Oemar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta,* Airlangga University Press, Surabaya.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT edisi Revisi,* KaryaMedia, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT,* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pound, Roscoe, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)* terjemahan Mohammad Radjab, Bhratara, Jakarta

Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

_____, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

Satrio, J., 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Simanjuntak, P.N.H., 2017, *Hukum perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Suherman, 1979, *Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV Alfabeta, Bandung.

Sutojo, Siswanto, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah*, Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta.

Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wicaksono, Frans Satriyo, 2009, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1130.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 113.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148.

C. INTERNET

Bernadheta, *Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik*, tanggal 11 September 2019, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d78bcd61c63c/mekanisme-pendaftaran-hak-tanggungan-secara->

elektronik/#_ftn7, diakses tanggal 23 Maret 2021, pukul 15.31 WIB.

Diana Kusumasari, *Membuat Surat Gugatan*, tanggal 20 April 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-cl2871>, diakses tanggal 25 Juli 2022 pukul 22:45.

Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil, <http://bkpp.kaboki.go.id/2017/03/30/disiplin-kerja-pegawai-negeri-sipil/>, diakses tanggal 12 April 2021, pukul 12:04 WIB.

FJP Law Offices, *Jaminan-Jaminan Utang dalam Hukum Indonesia*, tanggal 24 Maret 2021, <https://fjp-law.com/id/jaminan-jaminan-utang-dalam-hukum-indonesia/>, diakses tanggal 12 Juni 2022, pukul 02:15 WIB

Hasanah, Sovia, *Perbedaan Das Sollen dengan Das Sein*, tanggal 12 April 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i-lt5acd738a592ef>, diakses tanggal 5 Juli 2022 pukul 11:30 WIB.

Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Subang, *Prosedur Pengajuan Perkara Perdata dan Pidana*, <https://www.pn-subang.go.id/index.php?id=493>, diakses tanggal 25 Juli 2022 pukul 22:30 WIB.

Sofyan, Safran, tanggal 9 Agustus 2017, Notaris “*Openbare Ambtbenaren*”, dalam <https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambtbenaren-syafran-sofyan>, diakses tanggal 12 Oktober 2021, pukul 01:20 WIB.

D. TESIS

Kusumastuti, Maria Nurma Septi Arum, 2020, “Perlindungan Hukum Kreditur atas Berakhirnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang Tidak Diikuti Pemasangan Hak Tanggungan, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rumawardi, 2014, Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan yang Tidak Dipasang secara Sempurna, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. JURNAL

Alda Mubarak, Sukirno, dan Irawati, “Perlindungan Hukum para Pihak dalam Pembuatan Akta Notaris yang Berstatus Tersangka”, *Notarius*, Volume 13, Nomor 1, 2020.

Andria Luhur Prakoso, “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 05 Maret 2016.”

Fikri Ariesta Rahman, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal para Penghadap”, *Lex Renaissance*, Nomor 2, Volume 2, 3 Juli 2018.

H. Bachtiar Simatupang, “Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Volume 6, Nomor 2, 2 Desember 2019.

Kadek Cahya Susila Wibawa, “Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid”, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Lidya Christina Wardhani, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan”, *Lex Renaissance*, Volume 2, Nomor 1, 2 Januari 2017.

Melita Trisnawati, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang telah Meninggal”, *Notarius*, Volume 12, Nomor 01, 2019.

Rachmadi Usman, “Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dengan Akta”, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3.

Rafiq Adi Wardana, “Pembatalan Akta Jual Beli PPAT yang Cacat Hukum dengan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT.TK)”, *Jurnal Repertorium*, Volume 5, Nomor 1, 2019.

Teddy Anggoro, “Parate Eksekusi: Hak Kreditur yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37 Nomor 4, 2007.

Yunita Krysna Valayvi, “Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Keuangan Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan”, *Privat Law*, Volume IV Nomor 2, Juli-Desember 2016.

F. LAIN-LAIN

Habib Adjie, “Problema dan Solusi mengenai Covernote, Legalisasi, Waarmeking (Agar Tidak Menjadi Permasalahan Hukum), Bahan Seminar Indonesia Notary Community.

Masnah Sari, “Kewajiban PPAT untuk Merahasiakan Isi Akta-akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar yang diberikan Undang-Undang Guna Melindungi Kepentingan Masyarakat Umum”, *Makalah*, Pembekalan PPAT, Depok, 07 September 2002.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021, Petunjuk Teknis Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang secara Elektronik, hlm. 19.